

---

## KOTA: DARI PERSPEKTIF URBANISASI

Oleh: Ashaluddin Jalil\*)

**Abstract:** The growth of urban population in Riau province since last few decades has shown a trend of continuous increase. Although, there were some trends of constant and slightly declining percentage of population in some urban areas and newly formed districts, in overall the number of population was increasing. This phenomenon can be observed in the number of population growth since last few decades. During the years of 1971 to 1980, the average growth of urban population increased about 1.53 percent annually. The growth was continued to increase in the next decades which was during the years of 1981 to 1990 to an average of 2.67 percent annually. Furthermore, it was recorded in many literatures that since 1930 to 1990, despite of the fluctuation in the percentages, the increase of the percentages were significant. The increase is predicted to be continued to higher levels in the future years.

Another important implication is the sharp change of population proportion since 1990 to 2000 which was caused by inter-regional development and expansion activities in the scope of economic development regulation. Further meaning of those implications is that there is an imbalance distribution of population in the district and urban areas. These efforts shall continuously be improved. On the other hand, if the actual development of urban areas is not organised or left as what is progressing now such as in Indonesia, the *pseudo urbanization* may occur in the area.

**Keywords:** urban, urbanization, urban growth, pseudo urbanization

---

### Pengantar

Penyelidikan tentang perkotaan khususnya di kawasan negara-negara yang baru mengatur keadaan ekonominya seperti di Indonesia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan kota (kota) merupakan tempat utama bagi tenaga kerja baik yang terdidik dan terampil, setengah terampil dan tidak terdidik datang ke kota. Ramainya orang-orang yang datang ke kota jika disimak dengan sebenarnya berkait rapat dengan migrasi. Mereka berusaha untuk hidup dengan ragam cara beserta upaya yang dilakukannya.

Perkotaan adalah proses semakin terpusatnya penduduk serta permukiman dan kumpulan orang-orang dengan keragaman etnik. Semenjak Wirth (dalam \*) Ketua PPS Program Urban Studies Universitas Riau.

edisi Shogo, 1996, 3-8) menulis bahwa perkotaan diberi makna yaitu: *cara hidup yang khas di kota*, maka yang berkenaan dengan jumlah penduduk, kepadatan (density) dan pelbagai keragaman etnik boleh dijadikan sebagai indikator penyelidikan perkotaan. Seterusnya disebutkan bahwa penyelidikan tentang proses perkembangan kota perihal keragaman, pemusatan serta kisaran jumlah penduduk boleh dijadikan hal pokok untuk menyelidiki perubahan-perubahan yang tengah berlangsung dalam masyarakat.

Evers dan Korff (2002, p. 2-4) menganalisis bahwa di negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Thailand, kota-kota utama telah berubah. Perubahan ini disebabkan oleh kebijakan yang merujuk kepada globalisasi. Kegiatan ini didukung oleh perubahan-

---

perubahan sosial politik yang berhubungan kait kepada perubahan demokrasi.

Penyelidikan tentang perkembangan kota dilakukan oleh berbagai ahli khususnya di kota dan kota-kota besar (kota raya) yang terus tumbuh. Di Indonesia perkembangan kota dapat dikatakan merujuk kepada *ibukota negara* dan *pusat-pusat regional*. Mencermati hal ini kebijakan yang diberlakukan masih sangat beragam karena masa-masa sebelum perubahan Sistem Politik di Indonesia, semua kebijakan dipegang oleh pusat. Pihak pemerintah lokal dapat dikatakan tidak memiliki kekuasaan (*Authority*) untuk mengatur serta mengurus kota secara ketat.

Makna lain daripada berkembangnya kota ialah adanya kegiatan beserta kehidupan komunitas kota. Ciri khas kota-kota yang ada ialah berkembangnya sektor informal. Penjaja berkeliling, tukang ojek (hingga sekarang belum menjadi angkutan sah kota tetapi tetap berjalan), taksi gelap, pemulung (pengumpul barang bekas) dan kegiatan lainnya tampak semakin wujud. Seterusnya ialah kawasan-kawasan tertentu di kota semakin lama semakin berkembang. Perkembangan seperti inilah yang terus berlangsung dan wujudnya tidak saja ada di pusat-pusat kota tetapi juga merangkumi di pinggiran serta luar kawasan kota (di luar tapal batas). Makna seperti inilah yang semestinya disimak melalui penyelidikan yang dalam serta mengharuskan dikaji daripada pelbagai pandangan, konsepsi serta teoritik tentang kota.

### **Pengertian dan Batasan**

Ada beberapa makna dan pengertian yang mesti dijelaskan terlebih dahulu agar di dalam penulisan ini terhindar daripada kesalah-fahaman baik dalam pemakaian kata maupun tafsiran. Arti serta pemahaman konsep tentang: daerah perkotaan (*urban*), dan perkotaan (*urbanization*) semestinya dijelaskan beserta hubungannya dengan beberapa konsep yang lain.

Mula sekali penggunaan kata *urb* dipakai oleh Wirth (dalam edisi Shogo, 1996) yang menjelaskan tentang corak kehidupan kota seperti yang telah diuraikan di atas. Makna ini akhirnya melahirkan *urbanisme* iaitu cara hidup yang khas di kota dengan merangkumi indikator daripada jumlah penduduk, kepadatan (*density*), serta *etnik* yang beraneka (*heterogeneous*). Semenjak itu pula ramai pengkaji perkotaan menggunakan konsep tersebut. Ini dapat disebutkan seperti Philip M. Houser (Houser, 1985) menguraikan bahwa: *“...the definition of urban is, nevertheless, a complex matter. Population classified as urban varies greatly country by country. The delineation of areas as urban or rural is often related to administrative, political, historical or cultural considerations as well as demographic criteria”*.

United Nation (Seperti dikutip oleh Houser, 1985) menerangkan bahwa definisi *urban* merangkumi tiga hal utama iaitu: *“1) Classification of minor civil divisions on chosen criterion which may include: (a) type of local*

---

government, (b) number of inhabitants, (c) proportion of population engaged in agriculture; 2) classification of administrative centers of minor rural division as rural; and 3) classification of certain size localities (agglomerations) as urban, irrespective of administrative boundaries”.

Negara Amerika Serikat mendefinisikan *urban* mengikuti keperluan yang beraneka, khususnya definisi yang dibuat sebelum banci pada tahun 1950. Urban adalah suatu tempat atau kawasan yang ditempati oleh seramai 25,000 orang atau lebih. Tetapi kerana bilangan penduduk yang terus meningkat dengan cepat khasnya pada akhir dekad 1950-1960 kesesakan (density) kawasan menjadi ukuran utama untuk merujuk kepada *urban* ataupun *non urban*.

Merujuk kepada *Encyclopedia of Sociology* (Borgatta et.al.eds, 1992), menguraikan: “*Urbanization is the process of expansion in the entire system of interrelationships by which a population maintains itself in its habitat*”. And the most evident consequences of the process, and the most common measures of it, are an increase in the number of people at points of population concentration, an increase in the number of people at points of population concentration, an increase in the number of points at which population is concentrated, or both”.

Di Indonesia Milone (Milone, 1966, p.34) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkotaan (*urban*) semasa pemerintah kolonial Belanda ialah: “...utamanya dihubungkan dengan

adanya konsentrasi orang Eropa dan kegiatannya, dalam memberikan status administratif sebagai kotaya umumnya pada fungsi administratif pemerintah pusat dan pada kemampuan dari daerah yang bersangkutan untuk mengurus keuangan, sarana dan urusannya sendiri”.

Makna yang diberikan sebenarnya adalah: “*perkotaan meliputi semua kota dan pusat pemerintahan seperti: Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya (Undang-undang sebelumnya yaitu U.U no. 5 Tahun 1974), beserta yang paling bawah yaitu Kecamatan*”. Masuknya batas (sempadan) dari suatu kawasan juga dirangkumi oleh beberapa pakar perkotaan. Kawasan lain yang disamakan sebagai kawasan kota ialah pusat-pusat pemerintahan yang lebih rendah dengan jumlah penduduk di atas 20,000 orang (kota kecil) dan kegiatan utama di bidang non-pertanian.

Perihal kriteria kota serta perkotaan boleh beragam dan sangat tergantung daripada sesuatu negara. Nas (1984), menguraikan bahwa kisaran daripada jumlah penduduk kota antara lain: berpenduduk antara 20,000 hingga kurang dari 50,000 orang dikatakan kota kecil (*Town*), 50,000 sehingga kurang daripada 100,000 orang disebut kota (*City*) dan jumlah penduduk lebih daripada 100,000 orang dikatakan sebagai kota raya (*Metropolis*).

Perkotaan dimaknakan sebagai proses menjadi kota yang terkait dengan migrasi yang berimplikasi kepada pemusatan penduduk secara nyata. Dalam kaitan ini hijrahnya penduduk mengalami banyak hal, terutama adanya pelbagai perubahan baik perubahan dalam

---

bidang ekonomi, sosial maupun kehidupan dalam masyarakat itu sendiri. Konsentrasi yang ditujukan kepada jumlah penduduk adalah kenaikan persentase jumlah penduduk yang dihitung dari semua jumlah penduduk kota. Oleh karena itu, kenaikan persentase penduduk kota dapat diartikan dengan proses *perkotaan*.

Di dalam pengkajian tentang distribusi penduduk dari sudut pandang Geografi, penduduk ditetapkan kedalam kumpulan mengikut kawasan yaitu perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). Dalam hal ini batas (sempadan) kawasan urban tetap, artinya jumlah penduduk kota berubah melalui kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, didapati penggunaan konsep *tingkat urbanisasi* dan *urbanisasi*. *Tingkat urbanisasi* diartikan kepada persentase jumlah penduduk serta lamanya bermukim di kota pada masa tertentu. Sedangkan *Urbanisasi* dimaksudkan naiknya jumlah persentase penduduk yang bermukim di kota (Secha Alatas, 1988).

### **Perkembangan Kota: Perseptif Urbanisasi**

Eldridge (1956) mengatakan bahwa urbanisasi ialah suatu proses pemusatan penduduk di kawasan kota. Sejak itu pemakaian kata *urban* dipakai oleh semua pengkaji perkotaan. Hauser (1985) menjelaskan bahwa perkotaan sebagai suatu proses yang dapat dijelaskan seperti yang dibentangkan oleh Eldridge dengan merangkumi dua hal yaitu: a) *peningkatan proses konsentrasi* b) *Peningkatan skala konsentrasi individual*. Ini menghasilkan persentase permukiman

penduduk di kota meningkat.

Konsep urbanisasi mempunyai definisi yang berbeda dan berkait rapat dengan keadaan negara itu sendiri. Namun Hauser (1985) menjelaskan bahawa: '*... dengan urbanisasi untuk keperluan negara dari segi statistik dikatakan sebagai proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan*'. Oleh karena itu, konsep urbanisasi dapat diartikan adanya proporsi permukiman penduduk di perkotaan dan jumlah penduduk tersebut semakin bertambah.

Kota berfungsi sebagai pusat (*centre*) aktivitas baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya dari komunitas. Aktivitas ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat kota itu sendiri tetapi juga oleh komunitas ataupun kawasan pinggir (*hinterland*). Oleh karena itu didapati adanya sistem daerah perkotaan yaitu adanya struktur dan fungsi dari kota-kota yang ada dalam suatu negara yang mempengaruhi keadaan lingkungannya.

Definisi perkotaan boleh saja berubah dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, jumlah penduduk pada hakikatnya boleh berubah melalui kelahiran, kematian, migrasi dan perluasan kawasan kota itu sendiri (*re-classification*). Misalan ini dapat dimaklumi seperti sebuah kawasan pinggir serta di luar kota yang berkembang menjadi kawasan perkotaan atau telah ditetapkan menjadi daerah perkotaan (Secha Alatas, 1988). Perbedaan dalam hal memberi definisi tentang kota, para sarjana lebih merujuk kepada jumlah penduduk yang tinggal di kota. Perkotaan dapat dikatakan sebagai proses perkembangan dan corak kehidupan dalam kota. Oleh karena itu,

---

merujuk kepada Rahimah Abdul Aziz dan Mohd. Yusoff Ismail (2002, p. 38-67) bahwa kota wujud sebagai hasil proses perkotaan. Proses ini dianggap sebagai satu perubahan sosial yang penting dalam masyarakat yang menunjukkan sebahagian penduduknya mengalami satu kehidupan yang berbeda dari satu bahagian dengan bahagian yang lain.

Daerah perkotaan (*urban*) dalam suatu negara (daerah) meliputi seluruh kota-kota (*individual cities*) yang ada dan merangkumi seluruh unit-unit sekawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah perkotaan. Di Indonesia definisi perkotaan seperti yang dipakai oleh Milone (1966), BPS (1997), Merten dan Alatas (1988), Sigit dan Sutanto (1983) merujuk kepada adanya fasilitas umum yang telah ditentukan. Fasilitas tersebut meliputi 8 sehingga 14 jenis iaitu: "... adanya sekolah, jalan yang di aspal, listrik, air bersih, pusat pelayanan kesehatan, klinik bersalin, kantor pos, bank, pasar tertutup, kawasan pertokoan, penginapan dan atau hotel, telekomunikasi, persewaan peralatan pesta, teater (*studio*) dan transportasi dari dan ke daerah tersebut". Biro Pusat Statistik Indonesia (1996) menambah persyaratan tersebut dengan kriteria kepadatan penduduk yang tinggi dan umumnya kegiatan ekonomi penduduknya di bidang pertanian tidak melebihi 25 persen.

Para ahli mengatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di kota-kota Dunia Ketiga terus berlanjut. Todaro dan Stilkind (1981) menyatakan bahwa pada tahun 1950 terdapat 11 kota dari 15 kota-kota terbesar di dunia ada di negara industri. Pada tahun 2000 hanya tiga kota besar

saja yang ada di negara industri, selebihnya kota raya itu berada di kawasan negara-negara Dunia Ketiga. Kota besar (Kota Raya) di Dunia Ketiga berkembang dengan cepat, berjuta-juta penduduk pindah ke kota. Sementara itu, kota tidak mampu menerima migran karena fasilitas sosial seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, pengangkutan dan air bersih sudah melampaui kemampuan. Begitu juga dengan persoalan kekurangan kesempatan kerja di kota.

Perkotaan adalah satu fenomena yang berkelanjutan dan dialami oleh semua negara di dunia. Hamzah Sendut seperti yang dikutip oleh Rahimah Abdul Aziz menyatakan bahawa: "...proses perkotaan sebagai satu fenomena sosioekonomi yang meliputi dua unsur penting. Unsur pertama: ialah fasilitas umum dipusatkan di sebuah kawasan tertentu. Unsur kedua: ialah dikawasan tersebut terdapat jumlah penduduk yang melebihi 10,000 orang. Merujuk kepada pemikiran tersebut, kajian perkotaan setiap pengkaji harus meneliti dan memeriksa beberapa persoalan yaitu: (1) konsep perkotaan masih memerlukan telaah yang berkesinambungan karena dalam hal menganalisis perkembangan kota selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. (2) di Indonesia terdapat perbedaan pengertian baik aspek fisik maupun fungsional. Perbedaan ini terdapat ketika pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 1980 dan tahun 1990. (3) kadar pertambahan penduduk di perkotaan ternyata jauh lebih cepat, khususnya di Indonesia dan kawasan Asia. Pertambahan ini terkait dengan perkembangan jumlah penduduk dan

---

fasilitas umum. Fasilitas utama yang ada di kota-kota (baik besar apalagi kota kecil) dari hasil kajian dapat difahami bahwa yang ada merujuk kepada persoalan yang beragam dan dapat disebutkan belum memadai serta kurang dirasakan manfaatnya oleh lebih dari setengah jumlah penduduk yang bermukim di perkotaan. Fasilitas tersebut diantaranya adalah: perumahan, air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi, pengurusan sampah, drainase serta tempat-tempat publik (WC, tempat terbuka dan rehat).

Tekanan terhadap kawasan kota, telah dan akan terus meningkat mengikuti *waktu* dan *ruang*, terlebih lagi kepada masa depan. Perkembangan kota yang kian pesat akan menyebabkan pengurusan pelbagai persoalan kota. Hal ini menumbuhkan problema dan menjadi sangat kompleks sehingga memerlukan rancangan yang holistik. Hal ini dibentangkan oleh Nilon (1999; 3-4), Schwab (2000, 23-25); Mountford and Pessa (2000; 18-21). Dengan lain kata kasus ini ada di negara-negara Dunia Ketiga di mana industrinya tumbuh dan berkembang dengan pesat. Lebih khusus lagi ialah daerah perkotaan terkait dengan pesatnya migrasi penduduk (Population Action International, 2000: 89-95), sama pula halnya seperti yang dikatakan oleh Bennet (2000, 82) dan UNEP(2000,3).

Pada tahun 1900, hanya 9 persen penduduk dunia tinggal di kawasan kota. Jumlah penduduk kota bertambah menjadi 40 persen pada tahun 1980, 50 persen pada tahun 2000 dan dijangka akan mencapai jumlah 66 persen pada tahun 2025 (Mcintyre et.al, 200). Sebanyak 23 dari 25 kota-kota terbesar

di dunia berada di Afrika, Asia dan Amerika Latin (Sukopp, 1998). Perkembangan ekonomi di perkotaan yang meningkat terutama di kawasan Asia dijangka mendekati 5 milyar orang [61 persen] dari 8.1 milyar populasi penduduk Dunia akan tinggal di kawasan kota-kota Asia dan Afrika pada tahun 2030. Tingkat urbanisasi di Asia perkiraan mencapai angka 4 persen per tahun( UNEP, 2000). Pada tahun 2025, sejumlah 52 persen penduduk Asia akan tinggal di perkotaan. Keadaan tersebut akan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kawasan kota (lihat gambar 1).

Di Indonesia sejak tahun 1980 hingga ke tahun 1990 (BPS, 2001) jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat yaitu 12.6 juta orang dan terus bertambah dengan perkiraan 9 persen. Pertambahan ini jika ditarik rata-rata selama tahun itu tumbuh dengan tingkat 5.36 persen setiap tahun. NUDS (NUDS, 1995) juga berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk terutama di luar pulau Jawa adalah lebih besar jika dibandingkan dengan di pulau Jawa.

Di Riau pada tahun 1980 (BPS, 1982) jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan adalah 27.12 persen dari semua penduduk yang ada. Jumlah ini meningkat menjadi 31.67 persen pada tahun 1990(BPS, 1992), dan seterusnya menjadi 34.36 persen pada tahun 1995 (BPS, 1996) dan menurut Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 (BPS, 2002) telah mencapai 42 persen. Dalam masa lima tahun terdapat perubahan jumlah penduduk perkotaan. Pada tahun 1980, urbanisasi di Riau yang paling tinggi ialah di kota Pekanbaru. Ini diikuti oleh Pulau Batam dan kedudukan ketiga ialah

---

Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintan yaitu Kota Tanjungpinang. Pada tahun 1990 terjadi peningkatan yang tinggi di kota-kota yang sedang berkembang termasuklah Pulau Batam, Tanjungpinang, Tanjung Uban (di Pulau Bintan), Tanjungbalai Karimun dan Tanjung Batu (Pulau Kundur) Dumai dan Duri (di sekitar kawasan operasional P.T Caltex Pacific Indonesia).

Fenomena perkotaan di Riau menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan loka memaparkan perubahan demografis di mana terdapat peningkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi pada semua kota-kota di Indonesia.

Sebelumnya perbincangan tentang tingkat pertumbuhan penduduk kota yang berlanjut meliputi pelbagai makna khususnya kepada *trend* dan tingkat urbanisasi di Riau. Dalam hal ini ia akan mempengaruhi struktur beserta distribusi penduduk mengikuti umur, jenis kelamin, tenaga kerja. Sensus penduduk tahun 2000 telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota-kota di Riau telah meningkat dengan cepat. Faktor utama ialah adanya perubahan sistem yaitu dari sentralistik kepada sistem *desentralisasi* atau *Otonomi*. *Implikasinya ialah pihak pemerintah lokal (Provinsi) dan Kabupaten/kota berpeluang untuk mengatur dan membangun daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.*

Lebih jauh ini bermakna, perkembangan perkotaan di Riau tidaklah diikuti dengan perkembangan infrastruktur dan fasilitas sosial, sehingga tidak dapat mengimbangi keperluan masyarakat kota. Peluang pekerjaan bagi penduduk yang meningkat di kota-kota

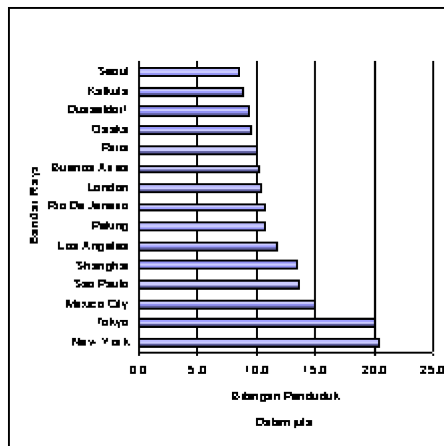
adalah sesuatu yang penting dan dapat menimbulkan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kasus-kasus kriminilatas. Todaro (1981, 1-3) menyebutkan bahwa adanya *kebijakan mendasar pengembangan perkotaan yang dikuasai oleh pemerintah pusa menyebabkan terjadinya urban bias*. Walaupun konsep *urban bias* ini banyak mendapat kritikan, namun menurut Nasikun (1980) untuk kasus Indonesia sangat terkait dengan kualitas kehidupan penduduk kota yang menyerap tenaga kerja dalam sektor informal dibanding dengan jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja di bidang pertanian. Jelas sekali *urban bias* yang dimaksudkan di atas juga telah menimbulkan fenomena sosial yaitu kemiskinan di perkotaan seperti yang dibentangkan oleh Dorodjatun Kuntjoro Djakti (eds. 1981), ataupun oleh Chris Manning (eds. 1985) yang disebutnya dengan *Over Urbanization* dan selaras dengan konsep *urbanisasi semu (Pseudo Urbanization)* seperti yang telah dikemukakan oleh McGee (dalam edisi Chrismanning, 1985).

#### **Perspektif Ekonomi**

Mc. Gee menyatakan bahwa dalam kaitan pertumbuhan penduduk kota, ramai penduduk yang hidup kepada keadaan *sub-marginal*, dengan keadaan fisik rumah yang sesak dan tidak selesa. Analisis Mc. Gee banyak bersandar kepada teori Geertz (1977: 28) tentang ciri dan struktur ekonomi kota. Pendapat Mc.Gee adalah didasarkan atas aspek *superiority* kota dalam menyediakan peluang pekerjaan serta pendapatan bagi migran yang berasal dari kampung, karena adanya ciri ekonomi *dualistic* kota. Ini adalah berdasarkan kasus Modjokuto yang di tulis Geertz dan di

pakai oleh Mc. Gee untuk menganalisis struktur ekonomi kota di negara-negara Dunia Ketiga khususnya di Indonesia.

Gambar1.  
Bilangan dan Pentarafan Penduduk Bandar Raya Dunia Tahun 1980

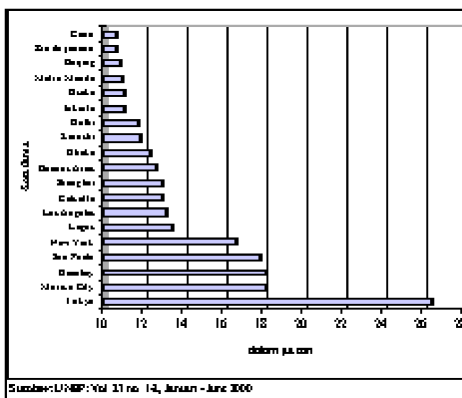


Dalam pemikiran McGee terdapat perbedaan nyata dalam aktivitas ekonomi kota di atas yaitu *kegiatan ekonomi moderen (firma) dan jenis bazaar (tradisional)*. Geertz menyatakan dua bahagian ini saling terkait. Sektor ekonomi pasar ialah jenis kegiatan perekonomian yang terpusat dengan kawalan ketat dari pelakunya, seperti aktivitas perdagangan dan industrialisasi. Selanjutnya melalui beberapa lembaga-lembaga sosial yang mengurus berbagai bidang pekerjaan, terutama dalam aspek-aspek pengagihan (*distributif*) atau produktif barang tertentu di kuasai oleh para pelaku ini. Sedangkan aktivitas kedua ialah sektor ekonomi bazaar (*tradisional*) iaitu kegiatan perdagangan yang keseluruhannya terpecah-pecah dan tidak terstruktur dengan transaksi antara perorangan yang jumlahnya

sangat besar dan tidak berkaitan satu sama lain. Jenis ini berdasarkan kepada aktivitas ekonomi kelompok-kelompok, keberhubungan antara satu sama lain berlangsung melalui aktivitas tukar menukar sementara dalam jumlah yang relatif besar.

Kedua-dua bentuk ekonomi kota di atas memperlihatkan perbedaan utama dari segi peluang pekerjaan yang dapat disediakan. Pada jenis ekonomi moderen (sektor intensif modal) memaparkan output tinggi, tetapi kemungkinan terdapat hubungan dari segi peluang pekerjaan terbatas, karena setiap pembaharuan dalam sektor ini lazimnya berimplikasi kepada keperluan buruh. Sebaliknya pada jenis ekonomi bazaar, peluang pekerjaan lebih tersedia. Jenis perekonomian bazaar juga dapat menjadikan kota berkemampuan untuk menyerap setiap pendatang terutama di sektor informal.

Gambar 2.  
Jumlah Penduduk kota-kota di dunia 10 juta keatas tahun 2000



Suatu hal yang perlu digaris bawahkan ialah penggunaan konsep Geertz yang di gunakan Mc. Gee menyatakan bahwa sistem pasar tradisional (*bazaar*)



---

merupakan satu lembaga perekonomian dan gaya hidup (*life style*). Lebih jauh lagi ia merupakan suatu cara di mana aktivitas perdagangan dapat dimasuki oleh semua lapisan dan segenap segi kehidupan masyarakat. Selain daripada kehidupan sosiokultural yang hampir lengkap, sistem bazaar juga mempunyai peranan dalam kehidupan sosial serta kultural penduduknya. Pasar mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat yang memberi asas organisasi sosial dan struktural yang utama secara keseluruhan. Ini termasuklah satu *segregasi* khas dalam aktivitas ekonomi yang sangat jelas daripada pelbagai ikatan sosial non-ekonomi yang ada. Dengan demikian tidak mengherankan bila sistem ini berlanjutan sejalan dengan peradaban yang masih ada dalam satu masyarakat secara luas. Dalam konteks ini penampungan tenaga kerja yang terus meningkat dapat berlangsung dan akan tetap berlangsung. Keadaan seperti ini wujud di kota-kota besar dan sedang di Indonesia termasuk di Riau.

Jika tingkat pertumbuhan penduduk kota pada akhir tahun 1980, dan dibandingkan dengan tahun 1961, terdapat peningkatan 2,3 kali dari jumlah penduduk antara tahun 1961-1980 (Pamudjo Rahardjo, 1986), maka proses perkembangan kota berlangsung pesat. Hal ini dapat diperhatikan selama dekade 1970-1980 menunjukkan bahwa antara tahun 1960-1970 merupakan perbaikan sistem ekonomi Indonesia sehingga dampaknya dirasakan pada tahun 1970-1980. Oleh karena berlakunya jurang (*kesenjangan*) hasil-hasil pembangunan antara kawasan kota dan di luar kota. Perbedaan ini disebabkan oleh proses dan

perkembangan daerah perkotaan itu sendiri. Kesan tersebut dapat disebutkan bahwa itu disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang bersifat *urban bias*.

Sehubungan dengan uraian di atas, Evers (1982), Evers dan Koorf (2002) telah menjelaskan bahwa urbanisasi lebih memfokuskan kepada dua aspek perkotaan yaitu merujuk kepada keadaan persentase penduduk yang tinggal di kawasan kota dan merujuk kepada suatu proses yaitu peningkatan jumlah penduduk kota. Raharjo (1996) menyatakan bahwa perkotaan ialah suatu proses perubahan persen penduduk yang bermastautin di kawasan kota. Batasan yang telah diberikan oleh Evers dan Rahardjo mewujudkan secara jelas bahawa didapati pertumbuhan penduduk kawasan kota. Dengan begitu apa yang dialami dan ditimbulkan oleh perkotaan menimbulkan persoalan besar, bukan sahaja terhadap kepada penyediaan keperluan asas, tetapi kewujudan kemiskinan di kota dan pengangguran. Hauser (1985) menguraikan bahwa perubahan persentase penduduk kota sebagai akibat adanya urbanisasi.

Para ahli yang telah menyelidiki urbanisasi di Dunia Ketiga, khususnya di kawasan Asia Tenggara, seperti Todaro (1985) telah menyatakan bahwa migrasi yang berlangsung ke kota bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dasar pemikiran Todaro yaitu adanya kelemahan utama dalam sistem ekonomi yang sangat mementingkan serta terlalu menekankan kepada kemajuan sektor moderen (*industry*) di kota. Schoorl (1982) pula menyebut: urbanisasi sebagai suatu proses yang membawa semakin ramainya penduduk suatu negara untuk tinggal di pusat-pusat kota. Golscheider

---

(1985) pula berhujah bahwa perubahan penduduk kota berkait rapat dengan faktor migrasi.

Pelbagai pendapat di atas merujuk kepada terjadinya perubahan dari segi jumlah penduduk di kota, yaitu dengan adanya migrasi sebagai akibat perbedaan kebijakan dalam sistem ekonomi yang *urban bias*. Perkara lain ialah adanya pengharapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di kota seperti yang dikemukakan oleh Todaro (*expected income*). Perkara ini pulalah menjadikan kota sebagai ajang perburuan ekonomi yang sangat kuat untuk penduduk desa. Faktor penarik ini sejalan pula dengan adanya faktor pendorong (*push*). Proses migrasi bagi Bogue (1973) melihat faktor-faktor penolak dan penarik yang saling kait mengkait.

Gilbert dan Gugler (1996) mengemukakan bahwa urbanisasi disebabkan adanya konsentrasi pembangunan melalui investasi dalam satu ataupun dua kota besar. Hal ini bermakna munculnya *kesenjangan wilayah* karena pelbagai potensi terus mengalir ke kawasan kota tersebut dan kawasan lain yang lebih produktif menjadi tidak produktif. Secara beransur-ansur struktur spasial akan terarah kepada bentuk dualistik yang terdiri daripada *pusat* yang pembangunannya cepat dan intensif, manakala *pinggiran* tertinggal dengan ekonomi yang sama sekali tidak terkait dengan pusat, bersifat stagnan dan menurun. Kepada semua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pelbagai kajian dan penyelidikan mengacu kepada kasus demi kasus di Indonesia, yang wujud adalah pertumbuhan, tetapi tidak sejalan dengan

perkembangan. Khususnya perkembangan kepada kesiapan mewujudkan kesempatan kerja, keperluan energi dan air bersih, pengangkutan, perumahan yang manusiawi dan sehat, mengemas sampah secara cermat serta perencanaan untuk penataan kota yang cemerlang. Selain daripada itu adalah infrastruktur yang buruk dan selalu tertinggal ketika pertumbuhan ekonomi dan penduduk terus melejit namun substansi kota pada hakekatnya hanya fisik yang berkembang sebaliknya (non fisik) semakin tidak menentu. Inilah yang disebut dengan *pseudo urbanization*.

### Rumusan

1. Konseptual kota dan perkotaan memerlukan perbincangan yang lebih spesifik. Maknanya ialah adanya perbedaan konsep perihal kota, kota besar serta fasilitas yang mengiringi arti konseptualisasi tersebut. Kasus di Indonesia walaupun makna daripada konsep perkotaan merujuk dan mengikut kepada tingkat persentase jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara-negara maju, didapati perbedaan yang signifikan. Namun urbanisasi yang terus berlangsung menempatkan kota-kota di Indonesia sebagai pusat perkembangan.
2. Urbanisasi di Indonesia tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan urbanisasi memberikan corak tersendiri yaitu menumbuhkan kesesakan (*density*) yang polutif, perumahan penduduk yang tidak terkendali (*terkontrol*) dan minimnya

- fasilitas umum seperti: air bersih, energi listrik, pengangkutan, drainase yang buruk, sampah yang tidak terkemas serta pelayanan kesehatan yang buruk.
3. Berkaitan dengan hal di atas, urbanisasi berhubung kait dengan kebijakan pembangunan. Keadaan ini sejalan dengan kebijakan yang disebut dengan *pro-growth* sehingga apa yang selama ini terjadi di Indonesia adalah *urban bias*. Sebab urbanisasi yang terjadi hanyalah merujuk kepada perubahan persentase jumlah penduduk kota itu sendiri.
  4. Kepada semua hal di atas, daripada pelbagai kajian dan penyelidikan menurut kasus di Indonesia, yang wujud adalah pertumbuhan, tetapi tidak sejalan dengan perkembangan. Khususnya perkembangan kepada kesiapan mewujudkan kesempatan kerja, keperluan energi dan air bersih, pengangkutan, perumahan yang manusiawi dan sehat, mengemas sampah secara cermat serta perencanaan untuk penataan kota yang cemerlang.

### Daftar Kepustakaan

- L. Wirth dalam edisi Shogo Koyano (editor) 1996. *Pengkajian Tentang Urbanisasi di Asia Tenggara*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, p.3-8. Mengulas pelbagai penyelidikan Urbanisasi di Dua Negara iaitu: Thailand dan Indonesia. Urbanisasi di kedua negara ini dihubungkan dengan industrialisasi khususnya perubahan dari sektor pertanian kepada industrialisasi.
- Evers and Korff, 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara*, Jakarta, Yayasan Obor. P.2-4. Menjelaskan bahawa perkotaan jika dilihat daripada ke-ruang-an, maka Bandar-bandar utama (*primat-cities*) berubah menjadi *metropolis* yang memiliki keberkaitan dan keberhubungan sama besarnya dengan negara itu sendiri.
- Hauser, M. Philip, et.al., 1985, *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan*, dengan kata pengantar Sri Pamudjo Rahardjo, Jakarta. Yayasan Obor.
- Edgar, F. Borgatta and Marie L. Borgatta (eds), 1992. *Encyclopedia of Sociology*, Volume IV, Macmillan Library Reference USA, Simon & Schuster Macmillan Newyork, USA.
- P.D. Milone, . *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*, Institute of Advanced Studies, University of California, Berkeley, 1966: 34. Pindaan daripada Milone ini berlaku manakala Indonesia membuat kajian untuk pengembangan Bandar-bandar Utama di Indonesia, sehingga lahirlah apa yang dipanggil dengan NUDS iaitu: *National Urban Development Strategies*, berlaku sebagai consultant membangun serta mengemas Bandar-bandar raya Indonesia.
- Nas, PJM, 1984. *Kota di Dunia Ketiga. Pengantar Sosiologi Perkotaan*, jilid 1 dan 2. Jakarta, Bhratara Karya Aksara Press, pp (1) 3-12, (2) 9-16.
- Secha Alatas, 1988. *Urbanisasi, Pertumbuhan Kota-kota Besar dan Sekitar Permasalahannya*. Majalah Demografi Indonesia (Indonesiaan Journal Demography), nombor 30, Tahun ke XV Desember, pp VI 83-101.

- 
- Jakarta, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- and educations. **Urban Ecosystems** 3, 3-4.
- Hope Testile Eldridge, 1956. *The Processes of Urbanization*. Dalam J.J. Spengler and O.D.Duncan (eds). *Demographics Analysis*. Glencoe, Free Press.
- Nasikun, 1980. *Urbanisasi Berlebih, Involusi Perbandaran dan Radikalisme Politik di Negeri-negeri Berkembang*. **Majalah Prisma** no.6, Juni, II: 9-22. Jakarta, LP3ES.
- Rahimah Abdul Aziz dan Mohd Yusoff Ismail, 2002. *Masyarakat Budaya dan Perubahan*, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Pp. 38-67
- Gilbert Alan & Gugler Josef, 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. **Pengantar**: Dr. Nasikun. Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, pp. 5-7
- Sigit dan Astrid Soesanto, 1983. *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta, Binacipta, p.132
- Bogue, DJ, 1973, *Principle of Demography*, New York: John Willey and Sons, Inc, p.753
- Biro Pusat Statistik Indonesia, 1996. *Penduduk Riau Hasil Survai Penduduk Antar Sensus tahun 1995*, Jakarta. Biro Pusat Statistik Indonesia, p. xix
- Schwab J C. 2000. Using Planning to enhance the Urban Environment. *Industries and Environment* 23 (1-2), 22-25.
- Todaro M.P. dan J. Stilkind, 1981. *City and Rural Neglect: The Dilemma of Urban Development*. New York: A Public Issues Paper of The Population Council.
- Mountford D and Pessa C. Achieving Sustainable Urban Development: from brownfields to environmental management. **Industri and Environment** 23 (1-2). Halaman 18-21.
- M.P. Todaro, 1985, *Dilema Urbanisasi*, dalam Chris Manning dan Tadjudin Noer Effendi (penyunting), **Urbanisasi, Pengangguran dan sektor Informal di Kota**, Jakarta, Gramedia, p.7
- Population Action International. 2000. Why Population Matters to Natural Resources. Fact Sheet 13. 1-2
- Scoorl, JW, 1982, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara Sedang Berkembang*, di Indonesiakan oleh RG. Soekadijo, Jakarta: Gramedia, p.263
- Bennet A J. 2000. Environmental consequences of increasing production: some current perspectives. **Agriculture, Ecosystems and Environment**. Halaman 82, 89-95.
- Golscheider, Calvin, 1985, *Populasi, Modernisasi dan Struktur Sosial*. Jakarta. Rajawali Press, p.297
- UNEP, 2000. Urbanization: meeting environmental challenges. **Industry and Environment** 23 (1-2), 3.
- Nilon C H, Berkowitz AR and Hollweg K S. 1999. Understanding Urban Ecosystems: A new frontier for science
- Mcintyre, NE, Knowles-Yáñez K, and Hope D. 2000. *Urban Ecology as an interdisciplinary field*: differences in the use of "urban" between the social and natural sciences. **Urban Ecosystems** 4, 5-24.
-

- 
- Sukopp H. 1998. *Urban Ecology-Scientific and Practical Aspects*. In Breuste J, Felmann H and Uhlmann O (Eds.). **Urban Ecology**. Germany. Springer-Verlaag, Germany, pp. 3-16.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2001, *Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Jakarta, BPS
- National Urban Development Strategy Project (NUDS), 1995, United Nation Centre for Human Settlements and Ministry of Public Works: Jakarta. ialah consultant yang dipakai oleh Indonesia untuk membina Bandar-bandar raya yang ada di Indonesia.
- Biro Pusat Statistik Indonesia, 1982. *Penduduk Riau Hasil Sensus Penduduk Tahun 1980*. Jakarta Seri S.2. BPS.
- Biro Pusat Statistik Indonesia, 1992. *Penduduk Riau Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990*. Jakarta. Seri S.2.04, BPS.
- Biro Pusat Statistik Indonesia, 1996. *Penduduk Riau Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1995*. Jakarta. Seri Supas, BPS.
- Biro Pusat Statistik Indonesia, 1002. *Penduduk Riau Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Pekanbaru. Seri Sensus Lengkap, BPS.
- M.P. Todaro dan J. Stilkind, 1981. *City and Rural Neglect: the Dilemma of Urban Development*. New York: A Public Issues Paper of The Population Council. P.1
- Dorodjatun Koentjoro-djakti dan Solaiman Soemardi (eds), 1981. *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta, LP3ES
- Chris Manning & Tadjuddin Noer Effendi (eds), 1985. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta, Yayasan Obor, pp.ix-xv
- Geertz, Clifford, 1977. *Penjaja dan Raja, Perubahan sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Diterjemahkan oleh S. Supomo, Edisi pertama. Jakarta: Gramedia, p.28
- Sri Pamudjo Rahardjo, 1986, *Pola Urbanisasi dan Implikasi Kebijakan Perkotaan di Indonesia*, dalam Kartomo Wirosuhardjo, dkk, **Kebijaksanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia**, Jakarta. Lembaga Penerbit FE.UI, p. 235
- Evers, Hans-Dieter & Rudiger Korff, 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara. Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial*. Jakarta, Yayasan Obor Evers, Hans-Dieter, 1982, *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malay-sia*, Jakarta. LP3ES.